

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Editor:

Novi Anoegrajkti



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2016

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Copyright©Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember, Agustus 2016

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember
bekerjasama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dan
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2016
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
www.penerbitombak.com

PO.690.07.'16

Editor:

Novi Anoegrajekti

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul
www.google.com.sg

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016
xvi + 416 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-258-381-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Ruang Negosiasi Tradisional dan Inovasional ~ vii

Kata Pengantar Ketua HISKI Pusat

Metamorfosis Bahasa, Sastra, dan Budaya ~ x

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember

Sastra: Jejak-jejak dan Perubahannya ~ xiv

BAGIAN PERTAMA: BAHASA MEMBANGUN MANUSIA

1. Lirik Tembang Jamu: Antara Pengenalan dan Romantisme
 - Sudartomo Macaryus ~ 1
2. Model-Model Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Kultur Jawa
 - M. Rus Andianto ~ 16
3. Mengenalkan Bahasa Daerah Sejak Dini kepada Anak
 - Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas ~ 46
4. Masa Depan Bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah Ancaman di Depan Mata
 - Hairus Salikin ~ 55

BAGIAN KEDUA: SASTRA DAN KESADARAN SOSIAL

1. Perubahan Sosial Berbasis Lintas Budaya: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal
 - Novi Anoeagrajekti ~ 68
2. Nasionalisme *Fashion*: Ekspresi Identitas Pascakolonial dalam Novel Trilogi *Ronggeng Dukuh Puruk* Karya Ahmad Tohari
 - Abu Bakar Ramadhan Muhamad ~ 84
3. Memahami Sosok Perempuan: *Parasit Lajang*, *Cerita Cinta Enrico*, dan *Pengakuan Eks Parasit Lajang*
 - Endang Sri Widayati ~ 103
4. Sastra Daerah Cermin Penanaman Pendidikan Perilaku Berkarakter
 - Muji ~ 119
5. Interpretasi Tanda-tanda Realitas Sosial dalam Puisi “Marto Klungsu dari Leiden” Karya Darmanto Jatman: Sebuah Tinjauan Semiotik Sastra
 - Sunarti Mustamar ~ 128
6. Teks *Swargarohanaparwa* sebagai Model Perilaku Moralitas dalam Kehidupan Manusia
 - Asri Sundari ~ 149
7. Representasi Perempuan dalam Novel *Perempuan Berkalung Sorban* Karya Abidah El-Khalieqy dan *Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan* Karya Ihsan Abdul Qudus: Kajian Stilistika
 - Ahmad Faizi ~ 158

8. Sastra Harjendranu dan Ajaran Kesempurnaan Resi Wisrawa Kepada Dewi Sukeksi: Suatu Rekonstruksi Konsep Etika Nusantara dalam *Serat Lokapala*
 - Eko Suwargono ~ 180
9. Urgensi Sastra Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Moral Bangsa: Kajian Sosiologi Sastra
 - Ali Imron Al-Ma'ruf ~ 204

BAGIAN KETIGA: BAHASA DAN SASTRA MEDIA EDUKASI

1. Pemanfaatan Nilai Edukasi Lagu Daerah di Indonesia dalam Pembangunan Karakter Bangsa
 - Anita Widjajanti ~ 220
2. Pengembangan Media Pembelajaran Demokratis Kooperatif dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara melalui Strategi Kooperatif *Think Pairs Share*
 - Arief Rijadi dan Parto ~ 232
3. Memelihara Keberdayaan Teks Dongeng melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berpendekatan *Whole Language*
 - Arju Muti'ah ~ 250
4. Model Pendidikan Pesantren dalam Novel *Santri Cengkir* Karya Abidah El-Khalieq
 - Furoidatul Husniah ~ 265
5. Strategi Kontestasi Jender dalam Sastra Anak Indonesia dan Sastra Anak Terjemahan: Pola Resistensi Tokoh Perempuan di Bawah Hegemoni Kultur Patriarki
 - Supiastutik dan Dina Dyah Kusumayanti ~ 275

BAGIAN KEEMPAT: BUDAYA VERBAL DAN NONVERBAL

1. *Welas Asih*: Merefleksi Tradisi Sakral, Memproyeksi Budaya Profan
 - Heru S.P. Saputra ~ 288
2. Membincang Kembali Diskursus Bangsa dalam Novel Indonesia: Dari Etnolokalitas sampai dengan Pascanasional-Pasca-Indonesia
 - Akhmad Taufiq ~ 314
3. Revitalisasi Budaya Seni dan Sastra Cina Pasca-Orde Baru
 - Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto, dan Sri Ana Handayani ~ 338
4. Mitos "Duplang Kamal-Pandak" di Lembah Gunung Argapura Jawa Timur
 - Sukatman ~ 359
5. Percumbuan antara *Danyang Buyut Cili* dengan *Barong Tuwa dalam Ritual Ider Bumi* di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi
 - Latifatul Izzah ~ 376
6. Proses Penciptaan Film Dokumenter *Java Teak*: Kontribusi Kayu Jati bagi Masyarakat Jawa
 - Muhammad Zamroni ~ 392

INDEKS ~ 410

REVITALISASI BUDAYA SENI DAN SASTRA CINA PASCA-ORDE BARU

**Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto,
dan Sri Ana Handayani**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
retnowinarni122@yahoo.com

A. Pendahuluan

Pemukiman-pemukiman kecil orang-orang Cina sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, terutama di bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukan politiknya di Jawa, penduduk Cina lalu bertambah banyak dan tersebar luas, bahkan di kawasan yang pada abad ke-18 belum lagi berada di bawah kekuasaan Belanda, seperti halnya dengan Kalimantan Barat dan Bangka, orang Tionghoa telah datang dalam jumlah besar. Menjelang tahun 1860, diperkirakan jumlah penduduk Cina di Indonesia sebanyak 222.000 orang, dua pertiganya berdiam di Pulau Jawa, tetapi pertumbuhan yang sangat pesat terjadi dalam 70 tahun belakangan, ketika imigran-imigran Tionghoa datang dalam jumlah besar bersamaan dengan meluasnya kekuasaan Belanda atas seluruh kepulauan dan peningkatan eksploitasi sumber-sumber kekayaannya (Coppel, 1994:22).

Etnis Cina merupakan masyarakat yang dikenal suka merantau. Kebiasaan merantau ini disebabkan oleh latar belakang kehidupan ekonomi yang sulit di negeri leluhurnya. Mereka paling banyak berhijrah ke Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan salah satu tujuan dari persinggahan orang-orang Tionghoa daratan (Usman, 2009:2). Orang-orang Cina tersebut pada umumnya datang ke Indonesia tanpa kaum perempuannya. Pada awalnya mereka masih merencanakan untuk kembali ke negeri Tiongkok apabila mereka telah mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak untuk hari tuanya, namun lama kelamaan mereka meninggalkan gagasan untuk kembali ke tanah asalnya. Mereka kemudian malahan hidup dengan perempuan setempat dan menetap

di Indonesia untuk selama-lamanya. Mereka membentuk komunitas sendiri yang makin lama makin berbeda secara kultural dengan masyarakat leluhur mereka (Cina), maka terbentuklah sebuah kelompok yang dalam banyak tulisan disebut sebagai golongan peranakan (Gondomono, 1996:2-3).

Perempuan-perempuan Tionghoa tidak ikut bermigrasi ke Indonesia dalam jumlah yang berarti sampai menjelang abad ke-20. Menurut penulis-penulis Cina dari Indonesia, hal ini disebabkan pelayaran dengan junk sangat berat bagi wanita, perjalanannya memakan waktu lama dan ongkos kapal sangat tinggi, tetapi yang penting pula menyangkut masalah tradisi, yang melarang wanita terhormat untuk mengadakan perjalanan ke seberang lautan. Mereka yang sudah kawin harus tinggal bersama mertuanya (Wilmott, 1960:18), dan perempuan Tionghoa yang belum kawin pun tidak ada yang bermigrasi kecuali mereka yang dibeli dan diambil sebagai pelacur (gundik). Dalam banyak kasus, migrasi secara illegal sampai tahun 1894 dan Undang-Undang yang ditetapkan lebih menekankan pada wanita daripada pria. Selain itu meskipun mereka telah mempunyai keluarga di tempat asalnya, kebanyakan dari mereka mengambil wanita pribumi sebagai istri kedua atau gundik (Coppel, 1994:22). Konsekuensinya anak-anak mereka kemudian dididik dengan tradisi ibu mereka, maka bisa dikatakan mereka harus beradaptasi dengan tradisi setempat, dan kemudian mereka harus juga menyesuaikan dengan budaya kolonial, sehingga sebelum akhir abad ke-19 mereka menganut budaya lokal kolonial (Wilmott, 1960:18). Blusse menyebut percampuran budaya ini dengan *strange culture* (Blusse, 1986). Adanya bentuk budaya yang aneh ini yang merupakan campuran antara budaya Tiongkok dengan budaya lokal dan kolonial menunjukkan bahwa telah terjadi adaptasi yang kemudian menyebabkan adanya asimilasi kultural antara ketiga unsur budaya tersebut, namun pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan orientasi budaya di kalangan etnis Tionghoa.

Perubahan orientasi budaya terjadi tepatnya pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan perkembangan proses-proses tertentu di dalam masyarakat Cina yang menghalangi asimilasi budaya. Perempuan-perempuan Cina asli sejak itu mulai berdatangan di Jawa, maka kemudian banyak peranakan yang kawin dengan perempuan Tionghoa asli, sehingga anak-anak dari hasil perkawinan itu dididik menurut tradisi Tiongkok daratan, baik dalam penggunaan bahasa, adat istiadat, maupun agama. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial untuk memisahkan masyarakat

Tionghoa peranakan dari penduduk pribumi. Tindakan ini mengakibatkan sejak saat itu mulai berkembang tradisi asli Tiongkok Daratan, dan secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan budaya lokal, sehingga sejak saat itu mulai jarang terjadi perkawinan dengan penduduk pribumi (Coppel, 1994). Kondisi ini kemudian diperkuat oleh perlakuan Pemerintah Kolonial terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah kolonial menempatkan orang-orang Cina dalam stratifikasi masyarakat Hindia Belanda di atas masyarakat pribumi (*Kompas*, 1995), sehingga di kalangan etnis Tionghoa muncul perasaan superior, sebaliknya muncul perasaan benci di kalangan masyarakat pribumi.

Menurut Coppel (1994) masih ada peristiwa lain yang semakin menjauhkan etnis Cina dengan etnis pribumi, yaitu berkembangnya nasionalisme Cina di kalangan Tionghoa peranakan di Jawa. Mereka bangga disebut sebagai bangsa Cina (Tiongkok) daripada bangsa Indonesia. Sejak itu mulailah proses pencinaan kembali etnis Cina di Jawa. Usaha yang semula tanpa disadari kemudian berubah menjadi usaha sadar dan terorganisasi. *Tiong Hwa Hwe Kuan* (THHK), sebuah perhimpunan Tionghoa perantauan kemudian mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak etnis Tionghoa, dan Pemerintah Kolonial pun kemudian mendirikan sekolah khusus anak-anak etnis Cina, yaitu *Hollandch Chinese School* (HCS). Leo Suryadinata menambahkan bahwa pada akhir abad ke-19, Pemerintah Kekaisaran Tiongkok mulai menaruh perhatian kepada orang-orang Cina perantauan di Asia Tenggara, termasuk di Hindia Belanda, karena pemerintah memandang orang-orang Cina perantauan sebagai sumber dukungan politik dan keuangan. Pejabat-pejabat dikirim untuk memajukan dan mengawasi pendidikan bagi anak-anak Cina, dan beasiswa disediakan bagi anak-anak Cina Perantauan untuk belajar di Tiongkok (Suryadinata, 1994:25). Tiga peristiwa inilah yang memastikan bagaimana corak interaksi antara etnis Cina dengan pribumi. Sejak saat itu masyarakat pribumi menganggap masyarakat Cina merupakan masyarakat tertutup (eksklusif). Akibatnya masyarakat pribumi sendiri kemudian mengambil jarak dari etnis Tionghoa.

Menyadari bahwa keterpisahan antara etnis Cina dengan etnis pribumi akan menimbulkan prasangka etnis yang bisa menjurus kepada konflik sosial, sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia telah menganjurkan adanya pembauran antara etnis Cina dengan etnis pribumi. Berdirinya lembaga-lembaga seperti Baperki, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) pada tahun 1963, merupakan wujud dari usaha memperbaiki hubungan antara etnis Cina dengan etnis pribumi, tetapi integrasi masih merupakan harapan bukan

kenyataan. Ketegangan demi ketegangan, kepincangan demi kepincangan di bidang ekonomi menimbulkan pelbagai letusan fisik dan garis pemisah makin tebal. Menyadari kondisi demikian kemudian diterbitkan instruksi Presiden No. 14 Th 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat-istiadat Tiongkok, yang berisi pertama bahwa tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek afinitas kultural yang berpusat pada negeri leluhurnya pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga. Kedua, perayaan-perayaan pesta agama dan adat-istiadat Cina dilakukan tidak mencolok di depan umum melainkan dalam lingkungan keluarga. Kemudian untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah telah dibentuk Badan Pembina Kesatuan Bangsa (BPKB) di DKI Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974. BPKB ini bergerak lang-sung ke dalam masyarakat melalui dinas-dinas Pemerintah Daerah dalam menggerakkan pendekatan “pri” dan “nonpri” di pelbagai lingkungan. Dari Pemerintah Pusat akhirnya diusahakan pula untuk menggalakkan pembauran kembali dengan TAP MPR IV/1978 BAB IV/D Sc, yang menegaskan bahwa usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dibentuk pula Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat (terbaur) dan Pemerintah (Jahja, 1983:41–42). Dampak positif dari peraturan ini adalah, etnis Cina terpaksa harus menyesuaikan diri dan berintegrasi ke dalam masyarakat pribumi setempat. Dengan demikian selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru telah terjadi perubahan perilaku etnis Cina dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang nantinya menghasilkan suatu pola baru dalam kehidupan etnis Cina. Namun demikian, bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru, menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk menggalakkan asimilasi dan membangun hubungan yang harmonis antara etnis Cina dengan pribumi seperti tidak berbekas. Kerusuhan anti Cina kembali marak, seperti peristiwa Mei 1998 di Jakarta. Saat itu –menandai awal zaman reformasi– masyarakat Cina menjadi sasaran kerusuhan.

Rezim Reformasi berbeda dengan Rezim Orde Baru yang berusaha membangun hubungan yang harmonis antara orang-orang Cina dengan pribumi dengan melarang festival agama dan budaya yang berasal dari Tiongkok daratan dengan peraturan pemerintah, Gus Dur justru menerbitkan kebijakan yang kontroversial dengan peraturan pemerintah Orde Baru. Gus Dur justru menghapus peraturan yang dianggap diskriminatif dan mengembalikan hak-hak warga Tionghoa untuk mengapresiasi kegiatan dalam bidang agama dan budaya. Pencabutan peraturan ini disambut dengan lega dan *euphoria*

bagi warga Cina. Sejak itu festival yang berhubungan dengan agama dan budaya Tiongkok dilakukan secara terbuka. Misalnya perayaan Hari Raya Imlek diselenggarakan secara besar-besaran di berbagai kota. Bahkan sepuluh tahun setelah reformasi, kegiatan semacam ini semakin semarak dan variatif. Misalnya selain upacara keagamaan di Kelenteng, warga Cina juga menyelenggarakan perayaan dengan berbagai hiburan bernuansa oriental yang dimodifikasi, misalnya penampilan *Chinese Drum* dari *Group Dong Fang Shen Yun* di Atrium Supermall Pakuwon Indah (SPI) tanggal 22 Januari 2012. Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia (PMTI) Jember mendatangkan secara khusus Wang Chia Chia, penyanyi papan atas Malaysia dalam malam ramah-tamah tahun baru Imlek 2563 (2012). Kegiatan lain, misalnya diadakannya kursus-kursus bahasa Cina yang diikuti oleh anak-anak orang Cina maupun pribumi. Organisasi-organisasi sosial yang telah lama ada yang kegiatannya statis hanya menangani masalah-masalah sosial kemudian juga mengalami revitalisasi yang wujud kegiatannya mengarah pada usaha menghidupkan kembali budaya warisan nenek moyang mereka. Pemberian izin mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini tampaknya baik sekali dalam rangka menghapus diskriminasi dan memperkenalkan budaya dan tradisi Cina kepada masyarakat Indonesia, sehingga akan muncul pemahaman bagi masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah dengan tiga bahasa sudah ada di berbagai kota, yang mengajarkan Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris. Ada juga organisasi Etnis Cina yang dalam kegiatannya berusaha menghidupkan kembali tradisi dan budaya Tiongkok secara terorganisasi. Mereka menggali kembali kebudayaan mereka, baik menyangkut bahasa khas, salah satu suku dari Tiongkok tersebut, kesenian (nyanyian dan tarian), makanan khas, maupun model pakaian tradisional Tiongkok asli. Kajian ini berusaha memecahkan persoalan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya usaha revitalisasi budaya, seni, dan sastra Cina. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam rangka revitalisasi dan bagaimana hasil dari revitalisasi tersebut.

B. Kerangka Teori

Revitalisasi dapat diartikan sebagai proses penggalian dan pengembangan kembali tradisi dan budaya Cina oleh orang-orang Cina. Proses penggalian dan pengembangan kembali menurut Winarni sudah pernah terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam peristiwa ini orang-orang Cina yang mayoritas sudah beradaptasi dengan tradisi dan budaya Jawa, secara perlahan tetapi pasti telah dipengaruhi kembali oleh budaya asli Tiongkok. Sejak awal

abad ke-20 tersebut ditemukan orang-orang Cina di Jawa dan keluarganya hidup dalam tradisi dan kebudayaan asli Tiongkok. Mereka telah mendidik anak-anak mereka dengan tradisi dan budaya Tiongkok. Mereka menganggap bahwa budaya Tiongkok adalah budaya tertinggi dan bangsa China adalah ras tertinggi dan beradab (Winarni, 2004:188). Peristiwa ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba.

Reorientasi kepada tradisi dan budaya asli Tiongkok ini awalnya terjadi karena adanya kritik. Semenjak abad ke-18, para musafir atau para pengamat memandang negatif terhadap hilangnya sifat-sifat kecinnaan pada keturunan perantau yang menetap di tanah Jawa. Salah satu di antara mereka adalah Ong Tae Hae, seperti dikutip Kwartanada (2006:2).

“di saat orang Cina tinggal di rantau untuk beberapa generasi tanpa pernah kembali ke tanah leluhurnya, mereka seringkali menjauhkan diri dari petunjuk orang-orang bijak (Konghuchu?): dalam bahasa, makanan dan busana, mereka meniru golongan pribumi, dan mempelajari buku-buku asing (Alquran?), mereka tidak berkeberatan menjadi orang Jawa, di saat mereka menyebut diri mereka Islam (Sit-lam). Mereka kemudian menolak untuk makan babi dan sekaligus memungut adat istiadat pribumi.”

Kritikan inilah yang memotivasi pihak-pihak yang merasa prihatin dengan kentalnya akulturasi budaya untuk mencari cara bagaimana caranya agar orang-orang Cina secara perlahan bisa dikembalikan orientasi budayanya kepada budaya asli Tiongkok. Usaha revitalisasi ini diawali oleh sebagian peranakan di Surabaya, kemudian disusul oleh Makasar, dengan cara salah satunya adalah membangun klenteng pemujaan kepada Konghuchu, dengan tujuan mempromosikan budaya Tiongkok terutama dengan membangkitkan adat istiadat pernikahan yang benar, meskipun upaya ini kurang berhasil dan kurang menyebar ke daerah lain. Oleh karena itu, usaha ini dilakukan secara terorganisasi terutama didirikannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di tahun 1900 (Kwartanada, 2006:3). Media yang dipandang paling cocok pada waktu itu adalah pendidikan.

Revitalisasi terulang lagi pada zaman Jepang, meskipun tidak sengaja. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang, ketika telah berhasil menguasai Indonesia, memandang perlu untuk mengatur komunitas Cina dengan kebijakan khusus. Kebijakan pendidikan untuk anak-anak orang Cina peranakan dengan menginstruksikan untuk menutup sekolah

bentukan Pemerintah Hindia Belanda, dan melarang pemakaian materi yang menggunakan bahasa Belanda atau Eropa lainnya, sehingga lembaga pendidikan seperti *Hollanch-Chineesche School* (HCS) ditutup. Anak-anak Cina peranakan diharuskan sekolah di lembaga bentukan pemerintah pendudukan Jepang yang dikelola organisasi *Hua Chiao Chung Hui* (HCCH). Kurikulumnya kebanyakan berkaitan dengan kebudayaan Tiongkok. Hasilnya adalah proses resifikasi (Kwartanada, 1996:43 dan Widodo, 2002:277).

Rosa mengatakan (dalam Salim, 2006:65), “etnik adalah kelompok yang anggotanya memegang warisan budaya dan sosial yang unik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.” Kelompok etnik sering kali identik dengan pola-pola kehidupan keluarga yang berbeda, bahasa, rekreasi, agama, dan adat istiadat lainnya yang menyebabkan mereka berbeda dengan kelompok lain. Pendapat ini dikuatkan oleh Grosby, yang menyatakan bahwa etnis melibatkan tradisi kebudayaan, termasuk bahasa dan agama, sebagai batas hubungan sosial (Grosby, 2011:18). Anggota dari kelompok etnik merasakan satu kesadaran akan jenis dan *interdependensce of fate*, dengan siapa pun yang memegang adat tradisi etnik (Salim, 2004:65).

Narrol dan Barth, seperti dikutip oleh Usman, menyebutkan bahwa kelompok etnis yang berbeda ditandai: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Usman, 2009:21).

Orang-orang Tiongkok atau Cina di Indonesia tidak suka dipanggil Cina, yang menurut mereka merupakan panggilan penghinaan. Mereka lebih suka disebut Tionghoa. Menurut Mahfud, istilah ini diciptakan sendiri oleh orang-orang yang berasal dari Tiongkok di Indonesia. Istilah Tionghoa dan Tiongkok lahir di Indonesia. Secara linguistik Tionghoa dan Tiongkok memang tidak dikenali atau didengar di luar masyarakat Indonesia. Istilah Tionghoa adalah istilah bahasa Indonesia yang khas, yang tidak dikenali di Malaysia dan Thailand. Chistiano Wibisono dalam tulisannya “Tionghoa dan Diaspora Politik RI” menjelaskan bahwa istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa China, dan artinya adalah orang

China dan negara China.¹ Leo Suryadinata menambahkan (1978) bahwa istilah Tionghoa sering dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum tahun 1965. Akan tetapi pada waktu itu di Bandung dalam pertemuan antara jenderal penting dari ABRI menghasilkan keputusan penggunaan istilah “Cina” ketika menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, yang harapannya untuk mengurangi atau menghapuskan perasaan inferior dan superior. Latar belakang inilah yang menyebabkan istilah “Cina” ini oleh masyarakat Tionghoa dianggap penghinaan, oleh karena itu, ketika mereka berbicara tentang masyarakatnya mereka menggunakan istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah orang Cina atau Cina dipakai (Suryadinata, 1978). Kajian ini tetap menggunakan kata Cina, namun tidak ada maksud penghinaan, tetapi hanya demi konsistensi karena karya-karya sebelumnya semuanya menggunakan kata Cina.

C. Usaha Revitalisasi dan Hasilnya

1. Menghidupkan Kembali Budaya, Tradisi, dan Seni

Masalah agama, kepercayaan dan adat-istiadat pada zaman Orde Baru diatur berdasarkan Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 tertanggal 6 Desember 1967. Peraturan ini menetapkan bahwa agama, kepercayaan dan adat-istiadat Cina yang terpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moral yang kurang wajar terhadap warga Negara Indonesia, sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar. Implikasi dari kebijakan ini adalah pelarangan perayaan agama orang Cina serta festival budaya di tempat umum, seperti Imlek, dan pertunjukan kesenian seperti Barongsai dan Liang Liyong. Mereka orang Cina hanya diperbolehkan melaksanakan perayaan secara intern, dalam lingkup keluarga atau perorangan (Chang Yau Hoon, 2012:47). Instruksi ini tidak memberi kesempatan berkembang bagi agama, budaya, dan adat istiadat.

Kesempatan baru diperoleh ketika Presiden Abdurachman Wahid (Gus Dur) memerintah. Bidang budaya mendapatkan ruang gerak yang leluasa sejak zaman reformasi tersebut. Pada tahun 2000 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat Cina (Setiono, 2002:1068).

¹ Lihat Chirstianto Wibisono, “Tionghoa dan Diaspora Politik RI.” Edisi Hari Kemerdekaan, *Tempo* 17-8-2004:42–43.

Pemberlakuan Keputusan Presiden tersebut menyebabkan pencarian posisi identitas Cina menemukan titik terang, semua ketentuan yang ada akibat Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku serta penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dapat dilakukan tanpa izin khusus untuk mengekspresikan secara publik berbagai aspek dari identitas etnis, kepercayaan, kebudayaan, dan tradisi asli mereka.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh masyarakat China. Hal ini dapat dilihat dari kegairahan mereka untuk menggali dan menghidupkan kembali budaya, tradisi, maupun seni yang berasal dari negeri Cina (Tiongkok). Berbagai kegiatan dilakukan, awalnya dengan sikap malu-malu, namun akhirnya menjadi usaha sengaja yang dilakukan secara sistematis untuk revitalisasi budaya warisan nenek moyang mereka. Mereka menghidupkan kembali kesenian yang sudah lama tidak pernah diaktivitaskan. Barongsai, yang mula-mula dihidupkan lagi. Barongsai merupakan tari tradisional rakyat Cina yang sudah ada sejak abad ke-3 SM. Barongsai muncul saat pemerintahan Dinasti Nan Bei yang berkuasa tahun 420–589 Masehi dan merupakan kesenian Tionghoa yang bentuknya menyerupai tubuh naga yang berkepala singa serta dimainkan oleh dua orang.

Barongsai muncul sebagai simbol ekspresi kebebasan di berbagai kota di Indonesia dalam kerangka beragama masyarakat Tionghoa. Sejarah masuknya barongsai ke Indonesia belum diketahui secara pasti, akan tetapi menurut Tjen Yong Yen, kesenian Barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-17, ketika terjadi migrasi besar-besaran dari Cina Selatan. Barongsai di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat diawali oleh perkumpulan *Tiong Hoa Hwee Koan*. Setiap perkumpulan *Tiong Hoa Hwee Koan* di berbagai daerah di Indonesia dapat dipastikan memiliki sebuah perkumpulan Barongsai. Seperti halnya daerah Jember, sebelum adanya peraturan PP No.10 tahun 1959, barongsai masih mendapatkan pamor bagus di mata masyarakat Jember. Banyak acara perkawinan atau perayaan besar orang Tionghoa pada saat itu diramaikan oleh kesenian barongsai. Pertunjukan barongsai saat itu masih erat kaitannya dengan tradisi dan upacara keagamaan orang Tionghoa. Perkembangan Barongsai kemudian berhenti setelah berlakunya berbagai peraturan pemerintah dan semakin menghilang pada tahun 1965 setelah meletusnya Gerakan 30 S/PKI, karena situasi politik pada waktu itu tidak memungkinkan lagi Barongsai tampil sebagai seni pertunjukan yang

ditontonkan. Segala macam penonjolan kebudayaan Tionghoa di Indonesia dibatasi untuk dipertontonkan di depan umum. Perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 kemudian membangkitkan kembali kesenian Barongsai dan kebudayaan Tionghoa lainnya (*Radar Jember*, Sabtu 24 Maret 2012, Nurhuda, 2014).

Warga Cina akhirnya tidak puas hanya menampilkan atraksi Barongsai pada saat ada perayaan, atau even-even tertentu, karena sejak itu mereka beramai-ramai mendirikan perkumpulan Barongsai. Misalnya seperti yang terjadi di Jember, pada tanggal 8 Mei 1998 didirikan perkumpulan khusus Barongsai, Liang-liong, dan Wushu. Ketiga kesenian Cina tersebut diwadahi menjadi satu dalam perkumpulan yang bernama Garuda. Perkumpulan ini merupakan satu-satunya perkumpulan kesenian Barongsai yang ada di Jember. Usaha ini dipelopori oleh seorang Cina keturunan bernama Iwan Natawidjaja. Perkumpulan tersebut merupakan induk dari organisasi bernama Persatuan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia (Persobarin) yang berada di bawah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI). Awalnya, ketika perkumpulan Garuda baru berdiri, status barongsai masih menjadi bagian dari cabang Wushu. Wushu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Tao Lu, San Shou, Barongsai, dan Liang-Liyong. Wushu mulai terdaftar di KONI sejak tahun 1992. Sejak tahun 1996 tepatnya pada acara Pekan Olah Raga Nasional yang ke-14, Wushu masih dimasukkan dalam kategori eksebisi dan statusnya belum resmi, memasuki tahun 2000 tepatnya acara Pekan Olah Raga Nasional yang ke-15 di Jawa Timur, Wushu resmi dimasukkan dalam kategori cabang olah raga yang dilombakan. Wushu Garuda juga sempat mendatangkan pelatih asal Tiongkok yang bernama Lei Peng. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, keluar Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa. Terbitnya keputusan tersebut tidak luput dari keinginan orang Tionghoa untuk membentuk sebuah Perkumpulan khusus Barongsai dan Liyang-liyong di Indonesia khususnya di Jember. Wawancara dengan Tjen Yong Yen (Nama Indonesia: Iwan Natawidjaja, tanggal 13 April 2014).

Revitalisasi bidang seni tidak hanya merambah seni pertunjukan Barongsai, Liang Liyong, dan Seni Bela Diri Wushu, tetapi juga seni tari dan seni suara. Seni tari dan musik tampak pada ketertarikan mereka pada Chinese Drum. Pada perayaan tahun Baru Imlek tahun 2563 di Surabaya, hiburan bernuansa oriental dimodifikasi, salah satunya Chinese Drum dari Grup Dong Fang Shen atraksi di atrium Supermal Pakuwon Indah. *Chinese Drum* ini dimainkan oleh

perempuan Cina asal Indonesia. Mereka belajar musik dari Tiongkok. Mereka tidak perlu waktu lama untuk belajar Chinese Drum. Latihan cukup dilakukan dua minggu. Setiap pekan mereka berlatih tiga kali. Kadang-kadang mereka berlatih sendiri di tempat tinggal masing-masing (*Jawa Pos*, 23 Januari 2012).

Seni suara juga termasuk yang dihidupkan kembali. Untuk merangsang agar minat terhadap seni suara dan musik Mandarin meningkat, ketika ada even-even tertentu, orang-orang Cina menampilkan penyanyi-penyanyi lagu Mandarin. Hal ini bisa dilihat penampilan mereka pada perayaan Hari Raya Imlek tahun 2012 di Surabaya (*Jawa Pos*, 23 Januari 2012). Perayaan Imlek di Jember yang diselenggarakan di New Sari Utama, jalan Hayam Wuruk, juga mengundang penyanyi papan atas Malaysia Wang Chia-Chia. Penyanyi ini melantunkan lagu-lagu Mandarin dengan impresif, dengan menyanyikan lagu hitnya, *Ti Tie Ti Lei* (Air Mata Pertama), sehingga bisa mengobati kerinduan masyarakat Cina akan lirik dan irama lagu yang benar-benar mengena (*Jawa Pos*, 3 Pebruari 2012).

Usaha revitalisasi tidak hanya dengan mendatangkan penyanyi lagu-lagu Mandarin, tetapi juga dengan meningkatkan minat untuk bisa menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Usaha itu dilakukan dengan cara mengadakan lomba menyanyikan lagu-lagu tersebut. Misalnya lomba yang digelar PTTTD Komda Jatim. Juara pertama dalam lomba ini berasal dari Jember. Juara pertama kategori senior putra dan putri ini diraih oleh Kevin dan Tanti Yuliahwati, kategori remaja putra dan putri diraih oleh Jesslin Regina dan Johanes, sedangkan kategori dewasa putri diraih oleh Sudiahwati, sementara Wijayanto berhasil meraih peringkat 6 terbaik. Pemenang lomba ini disambut secara khusus di markas mereka, yakni di Vihara Pay le Niang Niang, yang juga menjadi tempat berlatih mereka (Efendi, *Jawa Pos*, *Radar Jember*).

Menurut David, Asisten Tim Manager Vihara Pay Li Niang Niang, lomba ini sudah yang ke-8 kalinya yang diikuti Jember. Artinya bahwa sudah sejak delapan tahun yang lalu mereka warga Cina berusaha menggali kembali dan melestarikan budaya nenek moyangnya, seperti dikatakan David juga “Mandarin tidak bisa kita lepaskan, karena kebudayaan kami,” khusus untuk menguasai lagu-lagu Mandarin Hendro Santosa Manager Tim Kesenian Vihara Pay le Niang Niang mengatakan, bahwa tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti lomba, mereka hanya mengadakan latihan secara rutin, dan sesekali menambah porsi latihannya. Bahkan untuk pelatihnya pun, para talen membawa pelatih privatnya masing-masing (Effendi, *Jawa Pos*, *Radar Jember*).

Kegiatan semacam ini bisa diyakini tidak hanya dilakukan oleh warga Cina di Jember, tetapi di semua tempat yang didiami oleh masyarakat Cina. Contohnya di Yogyakarta, untuk melestarikan budaya Cina, warga Cina Yogyakarta membentuk perkumpulan *Hoo Hap Hwee* (benteng budaya Tionghoa), yang sudah berdiri sejak tahun 1917, yang berjuang di jalur budaya, bahkan bertekat menjadi benteng kebudayaan. Jika kegiatan ini juga dilakukan oleh komunitas Cina di tempat lain, berarti bahwa meskipun pada zaman Orba kegiatan yang bernuansa kebudayaan Cina dilarang diselenggarakan secara terbuka, kegiatan mereka tidak pernah fakum seratus persen, hanya mengalami surut, sehingga ketika datang angin segar yang member peluang untuk menghidupkan kembali budaya Cina, mereka tinggal merevitalisasi, bukan berangkat dari nol.

Antusiasme untuk menghidupkan kembali tradisi dapat dilihat juga ketika mereka merayakan tradisi tahunan, yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh. Pada kesempatan ini mereka tidak lagi merayakan tahun baru Cina tersebut hanya di rumah-rumah seperti yang mereka lakukan pada zaman Orde Baru. Mereka kemudian merayakan secara besar-besaran, dan secara terbuka, dengan menghiasi toko-toko dan tempat tinggal mereka dengan lampion, gambar liang liyong, dengan warna merah yang mencolok. Mereka tidak lagi hanya berkunjung ke kerabat dekat, tetapi pada puncak peringatan mereka adakan peringatan besar-besaran. Misalnya Tahun Baru Imlek di Makasar dirayakan besar-besaran, ada atraksi Barongsai, Klenteng dipadati pengunjung. Di Pati, Klenteng Hostigio yang berusia 200 tahun, mengadakan atraksi Barongsai dan Liang Liyong, Klenteng Ko Tik Kiong, Klenteng tertua di Surabaya memperingati Tahun baru Imlek dengan meriah, pengunjung wihara jumlahnya meningkat, tidak hanya orang-orang Cina, tetapi juga pribumi dan orang asing (Berita TV Metro TV, 4 Pebruari 2016).

Usaha melestarikan tradisi tidak hanya dengan peringatan secara besar-besaran, tetapi juga dengan cara mengenalkan generasi penerus mereka terhadap tradisi leluhur tersebut. Seperti yang terjadi di Jember, dalam mengenalkan budaya Imlek, anak-anak TK diajak mengunjungi Vihara Yen Man di Sempusari Kaliwates, dengan pakaian serba merah. Seorang pemandu hadir (Meliana), dan dengan cara seperti seorang guru mengenalkan kepada anak-anak tentang Imlek. Dengan cara ini anak-anak tidak hanya bersukaria merayakan Imlek, mereka mengenal sejarah Imlek lewat cerita sang pemandu (*Jawa Pos*, 29 Januari, 2012). Jadi sedini mungkin mereka (anak-anak) belajar keagamaan melalui peristiwa budaya itu.

2. Revitalisasi Bidang Bahasa dan Sastra.

Kebebasan penggunaan bahasa dan aksara Mandarin disambut antusias oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia, termasuk di Jember. Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina berdampak terhadap dilarangnya penggunaan aksara Tiongkok dalam bentuk penerbitan apapun, yang berlanjut dengan tindakan pemusnahan secara besar-besaran terhadap buku-buku berbahasa Mandarin, dan pada puncaknya adalah penutupan sekolah Cina. Barang-barang bertuliskan aksara Mandarin dilarang keras masuk ke wilayah Indonesia, dan bahasa Mandarin menjadi sesuatu yang dianggap tabu. Situasi kemudian berubah sejak jatuhnya Orde Baru. Masa reformasi telah banyak membawa perubahan bermanfaat bagi orang-orang Tionghoa. Sejak masa pemerintahan Habibie telah diberikannya peluang untuk mendirikan kembali pengajaran bahasa Mandarin pada bulan Mei 1999, kemudian ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang berdampak pada posisi bahasa Mandarin di Indonesia yang dapat dipelajari secara lebih bebas dan terbuka. Keputusan presiden tersebut membangkitkan minat orang Indonesia baik pribumi maupun Tionghoa terhadap bahasa Mandarin semakin besar. Program Studi Cina Universitas Indonesia dan Universitas Darma Persada yang sebelumnya diizinkan untuk melakukan studi tentang Cina oleh pemerintah, tetapi sejak tahun 2000 situasi mulai berubah. Selain menjamurnya tempat-tempat kursus bahasa Mandarin yang dikelola oleh Perguruan Tinggi, yayasan, badan atau lembaga pendidikan, kursus-kursus privat mandarin juga bertambah banyak. Untuk menjaga mutu pengajaran bahasa Mandarin, pada tahun 2001 didirikan Konsarium Kursus Bahasa Mandarin sebagai mitra Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. Tugasnya adalah menyusun kurikulum Standar Nasional, Melaksanakan Ujian Nasional dan Ujian Internasional *Hanyu Shuiping Kaoshi* (HSK) yang bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok.²

Pemerintah menyusun sejumlah buku ajar yang menjadi dasar dalam penyusunan Garis Besar Program Belajar. Buku ajar yang dipakai adalah *Chinese For Today I (Jinri Hanyu)*, *Conversational Chinese 301 (Hanyu Huihua 301)*, *Chinese Situational Dialogue (Hanyu Qingjing Duihua)*, *Chinese for Social Interaction (Hanyu Shehui Jiaoji)*, *Communicative Chinese (Jiaoji Hanyu)*, dan *Chinese Character Work Book*. Metode Pengajaran bahasa Mandarin

² <http://www.books.google.co.id/books?isbn=979224493x>. Diunduh tanggal 23 Juni 2014..

disampaikan dengan sistem ejaan bahasa Han (*Hanyu Pinyin*). Tidak hanya sebatas buku ajar, Departemen Pendidikan RRT melalui kerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional telah mengirimkan sejumlah tenaga sukarela untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar bahasa Mandarin. Kriteria tenaga pengajar tersebut adalah lulusan S-1 Bahasa Mandarin, berijazah D-3 Bahasa Mandarin atau lulus ujian nasional kursus bahasa Mandarin tingkat mahir dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Awalnya tenaga pengajar ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal. Akan tetapi memasuki era keterbukaan ini banyak tenaga pengajar sukarela yang akhirnya juga merambah ke kursus-kursus non formal (Kaboel dan Nita Madona Sulanti:225).

Dampak dari Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tersebut ditanggapi oleh berbagai pihak dengan antusias. Fakultas Sastra contohnya, telah memasukkan Bahasa Mandarin sebagai Mata Kuliah wajib di Jurusan Sastra Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi globalisasi yang menuntut penguasaan bahasa asing (Wawancara Nur Hidayah dengan Agus Sariono, 8 Mei 2014).

Lembaga lain yang menyelenggarakan pengajaran bahasa Mandarin adalah Sekolah Tiga Bahasa Rukun Harapan Jember yang dimiliki oleh Chen Wan Sin (Anwar Saosan). Rukun Harapan mengajarkan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin yang terdiri atas jenjang Playgroup, Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar. Melalui kerja sama antara Departemen Pendidikan RRT dengan Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah telah memberikan peluang untuk mengirimkan sejumlah tenaga pengajar sukarela dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar bahasa Mandarin. Sekolah Rukun Harapan mendapatkan empat tenaga pengajar dari RRT yang telah lulus S1 bahasa Mandarin serta lulus dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kehadiran bahasa Mandarin juga turut mengharumkan nama Jember di kancah kompetisi Jawa Timur. Pada bulan Mei 2010, di Surabaya diselenggarakan kompetisi ketangkasan berbahasa Mandarin yang diadakan oleh Badan Koordinasi Pengembangan Bahasa Tionghoa Jawa Timur. Kompetisi ini memberikan semangat siswa-siswi sekolah Tiga Bahasa Rukun Harapan Jember untuk turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Dalam perlombaan tersebut sekolah Rukun Harapan Jember meraih prestasi sebagai juara pertama. Untuk membangkitkan minat di dalam berbahasa Mandarin, tempat kursus mulai menjamur di berbagai daerah, seperti lembaga kursus bahasa Mandarin yang dimiliki oleh Dr.

Prayogo (berlokasi di Jalan Majapahit Jember) yang memperoleh satu tenaga pengajar langsung dari RRT untuk bahasa Mandarin. Tenaga pengajar tersebut mendapatkan tunjangan dari pemerintah RRT dan segala kebutuhannya sudah ditanggung oleh pihak pemerintah (Wawancara dengan Tan Sik Tjen: Pengurus THHK Jember tahun 1957–1966 dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Perkumpulan Hakka; Jember, 10 Januari 2014).

Sejumlah media, seperti Radio Suara Akbar Jember salah satu program siarannya menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini gayung bersambut dengan maraknya kursus bahasa Mandarin yang berdiri di mana-mana, sehingga siaran dalam bahasa mandarin mendapatkan sambutan baik dari etnis Cina maupun pribumi yang sudah paham bahasa Mandarin. Radio Suara Akbar sudah menyiarkan siaran dalam bahasa Mandarin sejak tahun 1998 hingga sekarang (2014). Secara umum, konsep siaran Radio Suara Akbar tidak berbeda dengan radio pada umumnya. Yang membedakan yaitu bahasa pengantar dan lagu-lagunya yang menggunakan bahasa Mandarin. Dalam hal segmentasi pasar, Radio Suara Akbar memiliki target *audience* dewasa yang berusia 25 tahun ke atas dari berbagai kalangan dan profesi. Durasi siaran Mandarin hanya sekitar lebih tiga jam sehari. Format siaran kata berupa informasi dan interaktif. Di luar tiga jam khusus ini, Suara Akbar menyiarkan musik pop Indonesia atau Barat yang sedang digandrungi anak-anak muda (Wawancara dengan Alfandi: produser siaran Radio Suara Akbar, tanggal 23 April 2014).

Satu-satunya media massa yang diizinkan terbit pada masa Orde Baru adalah Harian Indonesia. Harian Tionghoa diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bagi golongan penduduk keturunan Cina, terutama yang tidak dapat membaca tulisan berbahasa Indonesia. Walaupun demikian, setengah luas halaman harian ini memuat berita dan tulisan dalam bahasa Indonesia, guna menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa nasional Indonesia di kalangan pembaca yang berbahasa induk bahasa Cina. Surat kabar ini dikelola oleh Yayasan Indonesia Press yang berdiri sejak 24 September 1966. Beberapa pejabat pemerintah pernah duduk dalam pimpinan harian ini, antara lain Harsono Reno Utomo dan T.W. Slamet, keduanya dari Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Setelah beberapa kali terjadi pergantian pengurus, Harian *Indonesia* terakhir kali berada di bawah pemimpin umum Sukarno Hadi Wibowo, pemimpin umum Harian *Berita Buana*, dan pemimpin redaksi W.D. Sukisman.³

³ "Encyclopedia, Harian Indonesia." Dalam <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/902/Harian-Indonesia>. Diunduh tanggal 28 Juni 2014.

Presiden Habibie pada Era Reformasi, meratifikasi tentang Penghapusan diskriminasi rasial pada tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Pada masa pemerintahan Habibie banyak media bermunculan. Hal ini juga dipertegas kembali pada masa Abdurrahman Wahid yang menyatakan niatnya untuk membebaskan masyarakat dari kontrol negara atas informasi dan semua yang berhubungan dengan pekerjaan sosial. Hal ini dilakukan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pascapembubaran Departemen Penerangan tersebut berbagai media mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kesempatan ini juga tidak dilewatkan oleh sejumlah media yang mengambil segmentasi warga keturunan Cina sebagai target pasar. Berbagai media yang kemudian muncul di ranah publik menyediakan berita dengan bahasa Mandarin, yaitu *Harian Indonesia Shang Bao*, *Guo Ji Ri Bao*, *Re Ji Ri Bao* (Harian Indonesia), *Kun Dian Ribao*, *The Universal Daily News*, *Era Baru*, *Sinergi*, dan *Suara Baru* (Prasetyo, 2010:171).

Berbagai media massa yang hadir pasca-Orde Baru juga dirasakan oleh mayoritas orang Tionghoa di Jember. Seperti halnya media massa *Harian Nusantara* (Qian dao ribao). *Harian Nusantara* merupakan surat kabar berbahasa Tionghoa yang beredar sejak tanggal 10 Oktober 2000. Media massa ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia. *Harian Nusantara* menyajikan berita-berita dalam negeri dan hanya sedikit mengenai berita-berita manca Negara.⁴

Selain itu muncul juga media massa *Guo Ji Ri Bao* yang juga menjadi bahan bacaan bagi kalangan orang Tionghoa khususnya di Jember. *Guo Ji Ri Bao* (Berita Harian Internasional) adalah surat kabar nasional Indonesia yang dituliskan dalam bahasa Mandarin yang menyajikan berbagai berita luar negeri. Surat kabar ini dipimpin oleh Bambang Suryono (Lie Zuo Hui), seorang mantan wartawan harian *Warta Bakti* (dulunya disebut *Harian Sin Po*) (Leo Suryadinata, 1994:28). *Guo Ji Ri Bao* diterbitkan pertama kali pada tahun 2001 dengan 6.000 eksemplar dicetak setiap harinya. Dalam perkembangannya, *Guo Ji Ri Bao* tergabung ke dalam Jawa Pos Group. Dengan memanfaatkan jaringan dari *Jawa Pos*. Dengan isi berita umum yang terus bertambah dan makin lengkap, tidaklah mengherankan *Guo Ji* mendapat sambutan hangat

⁴ "Wikipedia, Harian Nusantara." Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Harian_Nusantara. Diunduh tanggal 28 Juni 2014.

dari masyarakat, sehingga sampai dengan awal tahun 2007, data sirkulasi Guo Ji telah berolah mendekati 60.000 eksemplar.⁵

Perihal bahasa Tan Sik Tjen menuturkan bahwa langkah yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan kebebasan bagi kalangan minoritas khususnya dalam hal bahasa Mandarin sangat benar. Kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa yang memberikan keleluasaan dalam sektor ekonomi menjadikan kebutuhan akan bahasa Mandarin sangat penting. Hal senada juga dikatakan oleh Tee San Haihong bahwa iklim politik sudah jauh berbeda dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya dan pertumbuhan pesat ekonomi Tiongkok membuat minat terhadap orang-orang pribumi maupun generasi Tionghoa yang lahir sebelum tahun 1965 semakin menguat untuk mempelajari kembali bahasa Mandarin. Hal ini juga terjadi pada berbagai kursus bahasa Mandarin yang juga mulai berkembang di setiap daerah khususnya di Jember. Perkembangan ekonomi dan industri China itulah yang menjadi salah satu pemicu keharusan menguasai bahasa tersebut. Wawancara dengan Tan Sik Tjen (nama Indonesia: Bambang Gunawan), tanggal 10 Januari 2014 dan Wawancara dengan Tee San Haihong (nama Indonesia: Taurus Tri Sang Hana), pemilik toko Domino di Jalan Sultan Agung, tanggal 22 Juni 2014).

Kesusastraan Melayu-Cina adalah tonggak sejarah yang terlupakan di Nusantara. Selama hampir satu abad (1870–1960) dihasilkan tidak kurang dari 3.005 karya sastra dengan melibatkan 806 penulis yang jauh melampaui jumlah karya dan penulis dalam sastra Indonesia modern. Karya sastra Melayu Cina merupakan refleksi kritis terhadap dinamika yang terjadi semasa puncak *Pax Neederlandica* (masa keemasan penjajahan Belanda) dan beberapa dekade awal kemerdekaan Indonesia. Pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami kelompok etnis Cina sebagai warna “Indo” dari Indonesia tergambar dalam karya-karya tersebut (Santosa, 2012:162).

Keberadaan etnis Cina yang tidak seragam, ada yang berorientasi ke negeri leluhur, berpihak kepada Indonesia, atau memuja kolonialisme Belanda, terekam dalam rangkaian karya tersebut. Hal itu menggambarkan pluralitas dalam komunitas Cina yang di mata masyarakat banyak sering disamaratakan dengan stereotip tertentu.

⁵ “Koran Mandarin Guo Ji Ri Bao.” Dalam <http://doremindo.wordpress.com/2013/05/07/koran-mandarin-guo-ji-ri-bao> 5%9B%BD%E9%99%85%E6%97%A5%E6%8A%A5/. Diunduh tanggal 28 Juni 2014.

Di era kemerdekaan Indonesia, justru terjadi ironi, karya sastra peranakan Tionghoa tidak mendapat pengakuan dalam khazanah budaya bangsa dan barang tentu gagasan yang dibawa pun secara perlahan-lahan terlupakan. Ibnu Wahyudi, kritikus sastra menilai bahwa karya sastra peranakan Cina sangat dianaktirikan. Pemerintah menganggap kesusastraan angkatan Balai Pustaka sebagai tonggak sejarah sastra Indonesia, padahal sastra Melayu Cina sudah muncul sejak tahun 1870-an. Karena ada embel-embel Cina itulah yang menjadi dosa, sehingga mereka tidak diakui. Padahal, kalau mau konsekuen berbicara sastra Indonesia, semestinya adalah karya kesusastraan yang dihasilkan sesudah 17 Agustus 1945, papar Ibnu (Santosa, 2012:158–159). Myra Sidharta juga menyayangkan marjinalisasi terhadap karya sastra Melayu Cina. Padahal menurutnya berdasarkan pengamatannya terhadap budaya peranakan Cina di Asia Tenggara, Indonesia memiliki warna paling kaya dari sebuah budaya Indo-Tionghoa yang ada (Santosa, 2012:159).

Marjinalisasi terhadap sastra Melayu Cina sangat bersifat politis. Penggunaan bahasa Melayu rendah yang merupakan bahasa pasar dijadikan dalih bahwa karya sastra itu tidak dianggap sebagai kesusastraan Indonesia. Sementara itu, karya sastra Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dianggap sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Kebijakan politik berusaha menekankan sebuah karya sastra yang layak diakui disusun dalam bahasa yang baik dan benar. Ini sangat mengada-ada. Peningkaran terhadap sastra Melayu Cina disebabkan oleh hal yang mendasar, yakni semata karena keberadaan penulisnya yang notabene etnis Cina, sehingga tidak diakui sebagai bagian Indonesia. Alasan penggunaan bahasa Melayu pasar dalam sastra Melayu Cina tidak masuk akal. Berkaitan dengan hal itu usaha secara makro adalah perlunya reposisi terhadap pengertian sastra Indonesia modern. Apa yang dimaksud sebagai Indonesia harus tegas, pengakuan terhadap eksistensi sastra Melayu Cina merupakan jalan agar sastra Melayu Cina bisa berkembang di tengah masyarakat terbaur Indonesia. Sementara usaha secara mikro, bisa dilihat dari usaha perseorangan dalam mengembangkan sastra Melayu Cina. Seperti yang dilakukan Tjandinegara seorang penulis sastra Cina yang memulai kegiatannya dengan menerjemahkan puisi-puisi dari Bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia. Ia mengalihbahasakan sejumlah karya penyair ternama Indonesia seperti WS Rendra, Eka Budiarta, Danarto, Taufik Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, dan Ahmadun Yosi Herfanda ke dalam Bahasa Mandarin. Tahun 2000 antologi puisi yang bertajuk *Resonansi Indonesia* itu diterbitkan KSI sebanyak 1000 eksemplar. Karya-karya penyair tersebut

disajikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Mandarin lengkap dengan aksara Cina. Dalam menyiapkan Resonansi, ia dibantu Yin Hua (PPYH) dan Coecillia K, redaktur Indonesia. Tentunya masih banyak Candinegara yang lain yang belum bisa disebutkan dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan bahwa faktor penting dalam perkembangan suatu budaya, seni, dan sastra disebabkan oleh faktor minat dan kecintaan pendukungnya untuk menghidupkan, mengembangkan, dan melestarikan kebijakan serta merupakan faktor penting di dalam kehidupan budaya, seni, maupun sastra. Kebijakan juga menentukan arah dari perkembangan budaya, seni maupun sastra. Hal ini dapat dilihat misalnya pada tahun 2000 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat Cina. Kebijakan ini memotivasi orang-orang Cina untuk menggali kembali, menghidupkan dan mengembangkan budaya, seni dan sastra Cina.

Usaha dalam revitalisasi budaya ada yang berhasil, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya usaha mereka untuk menghidupkan kembali kesenian Barongsai dan Liang Liyong. Hal ini bisa dilihat bahwa kesenian ini pada saat ini telah biasa dipentaskan secara terbuka baik oleh orang-orang Cina maupun pribumi. Dalam hal tradisi, misalnya perayaan Hari Raya Imlek telah diselenggarakan secara terbuka, sedangkan yang kurang berhasil adalah revitalisasi dalam bidang sastra, karena sampai sekarang belum ada pengakuan secara resmi sastra Melayu Cina.

Daftar Pustaka

- Assa, R. Kaboel dan Nita Madona Sulanti. (Tanpa tahun). "Bahasa Mandarin Dimana-mana." Dalam I. Wibowo.
- Blusse, Leonard. 1986. *Strange Company, Chinese Settlers, Mestizo Women and The Dutch in VOC Batavia*. Dordrecht Holland/Riverton, USA: Foris Publications.
- Dahana, Abdullah. 1977. "Ethnic Chinese in Indonesia: Issues of Identity." Dalam Mely G.Tan, (ed) Leo Suryadinata. *The Ethnic Chinese in Southeast Asians*. Singapore and London: Institute of Southeast Asian Studies.
- Carey, Peter. 1985. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755–1825)*. Jakarta: PT Pustaka Aset.

- Coppel, Charles, A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: PT. Pustaka Aset
- Dennis, Lombard. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ember, CL dan Melvin Ember. 1984. "Teori dan Metode Antropologi Budaya." Dalam TO Ihromi (ed). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Furnivall, J.S. 1980. *Plural Societies, Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development, edited by Hans Dieter Ever*. Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press.
- Gondomono. 1996. *Membanting Tulang Menyembah Arwah, Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*. Jakarta: Fakultas Sastra UI.
- Gordon, Milton M. 1968. *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*. New York: Free Press.
- Ibi, Abdullah. 2009. *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jahja, Junus (Penyunting). 1983. *Garis Rasial Garis Usang (Liku-Liku Pembauran)*, Jakarta: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa.
- Kadir Zein, Abdullah. 2000. *Etnis Cina (Dalam Potret Pembauran di Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia.
- Labovitz, S dan R Hagedorn. 1982. *Metode Riset Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Masalah. 2005. "Masalah Cina 2; Masa Kolonial & Orde Lama." Dalam <http://www.yabina.org/artikel/A50>. Htm. Diunduh 14 Oktober 2005.
- Nawawi, H. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pelly, Usman. 2004. "Masalah Asimilasi Keturunan Cina: Sebuah Gugatan Sosiokultural." *Analisis CSIS*. No 1, Januari–Pebruari, Tahun XXIII, 2004.
- Prasetyo, Stanley Adi. 2010. "Adakah Media untuk Keturunan Tionghoa?" Dalam I Wibowo dan Tung Ju Lan. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hlm. 166–182.
- Rani Usman, Abdullah. 2009. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rustopo. *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895–1998*. Yogyakarta: Yayasan Nabil.

- Spradley, J. 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt.
- Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917–1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 1978. "Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China." Kuala Lumpur Malaysia: Heinemann Educational Books.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Sutjipto, FA. 1983. *Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII Sampai Medio Abad XIX)*. Yogyakarta: TP.
- Wasino. 2006. *Wong Jawa dan Wong Cina: Liku-Liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo Tahun 1911–1998*. Semarang: UNNES Press.
- Wilmott, Donald Earl. 1960. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indoneisia*. New York: Cornell University Press.
- Winarni, Retno. 2005. "Integrasi Etnis Cina dengan Etnis Madura: Studi tentang Struktur Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Orang-Orang Cina di Kabupaten Situbondo." Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Winarni, Retno. 2009. "Ingin Menjadi Pribumi: Studi tentang Strategi Adaptasi Orang Orang Tionghoa dalam Bidang Politik, Sosial dan Budaya di Kabupaten Situbondo." Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.